

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**

#### **3.1 Landasan Teori**

##### **3.1.1 Anggaran**

###### **3.1.1.1 Pengertian Anggaran**

Pengertian anggaran yang dikemukakan para ahli pada dasarnya sama yaitu merupakan suatu rencana yang menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Instansi untuk periode waktu tertentu. Periode yang biasanya digunakan oleh Instansi dalam penyusunan anggaran umumnya tidak lebih dari satu tahun.

Definisi Anggaran banyak yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2011:226) adalah:

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Penganggaran merupakan proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja alat pengordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja”.

Dan pengertian anggaran menurut Darmanegara (2010:6) adalah:

“Anggran adalah cetak biru untuk gambaran tindakan dan formalitas dari proses perencanaan”.

Oleh karena itu menurut (Rudianto 2009:3) adalah:

“Rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis”.

Dan pengertian serupa tentang anggaran dikemukakan oleh M. Nafarin (2008:12) adalah:

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan”.

Dari keempat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam bentuk kualitatif dan dalam suatu periode tertentu. Dalam anggaran itu termasuk juga serangkaian tindakan antisipasi untuk menyesuaikan keadaan di masa mendatang dengan cara yang telah ditetapkan, karena itu anggaran juga dipakai sebagai alat koordinasi dan implementasi antara rencana awal dengan aktivitas yang sedang berlangsung.

Anggaran merupakan rencana tertulis dan cetak biru untuk gambaran tindakan dan formalitas dari proses perencanaan mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

### 3.1.1.2 Karakteristik Anggaran

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Robert N. Anthony, dkk (2005:44-45)

adalah:

“Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dinyatakan dalam satuan uang (moneter) walaupun angkanya berasal dari angka bukan keuangan.
2. Mencakup kurun waktu satu tahun.
3. Isinya menyagkut komitmen manajemen yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan.
4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang lebih tinggi dari yang menyusunnya.
5. Jika anggaran sudah di sahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah, kecuali dalam hal khusus.
6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik dan varian yang terjadi dianalisis dan dijelaskan”.

Menurut Mulyadi (2005:511) Karakteristik anggaran yang baik adalah:

“Anggaran yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran disusun berdasarkan Program.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian”.

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran dinyatakan dalam satuan uang (moneter) walaupun angkanya berasal dari angka bukan keuangan dan disusun berdasarkan Program dan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan dan berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

### **3.1.2 Pengadaan Barang**

#### **3.1.2.1 Pengertian Pengadaan Barang**

Istilah pengadaan barang secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang/jasa pada Institusi atau Instansi pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman. Berikut pengertian Pengadaan Barang menurut para ahli:

Pengertian Pengadaan Barang menurut Mulyadi, (2008:299-300) adalah:

“Senada dengan pengadaan pada instansi pemerintah, pada sebuah perusahaan terdapat system akuntansi pembelian yang merupakan system yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan.

Fungsi Pembelian yang merupakan salah satu fungsi dalam system akuntansi pembelian pada perusahaan, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih”.

Menurut Budiharjo Hardjowijono dkk, (2008) :

“Pengadaan Barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas”.

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut maka, pengadaan merupakan kegiatan yang dimulai dari proses merencanakan kebutuhan barang sampai diperoleh barang tersebut oleh instansi pemerintah, dengan prinsip-prinsip secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.

### 3.1.2.2 Metode-Metode Pengadaan Barang

Terkait dengan kegiatan perusahaan dalam menentukan jenjang wewenang pemilihan pemasok, terdapat tiga bagian sistem akuntansi pembelian, di antaranya menurut Mulyadi, 2008:302) adalah :

- “1. Sistem akuntansi pembelian dengan pembelian langsung. Dalam sistem pembelian ini, pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian, tanpa melalui penawaran harga. Biasanya pembelian dengan pengadaan langsung ini meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali pembelian.
2. Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh fungsi pembelian dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman permintaan penawaran harga kepada paling sedikit tiga pemasok didasarkan pada pertimbangan harga penawaran dari para pemasok tersebut.
3. Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk, melalui lelang yang diikuti oleh pemasok yang jumlahnya terbatas”.

Berdasarkan dari definisi diatas maka metode pengadaan barang dilakukan dengan Sistem akuntansi pembelian dengan pembelian langsung, Sistem akuntansi pembelian dengan penunjuk langsung dan Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Dalam menentukan jenjang wewenang pemilihan pemasok.

### **3.1.3 Pembangunan**

#### 3.1.3.1 Pengertian Pembangunan

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spesial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam

banyak hal membuktikan keberhasilan. Berikut pengertian Pembangunan menurut para ahli:

Menurut Nughoro dan Rochmin Dahuri, (2004) adalah

“ Pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintas (menembus) batas ruang dan waktu. Implikasi kajian aspek special menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik”.

Sedangkan menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005) adalah:

“Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya Perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan dan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat secara adil.

## **3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek**

### **3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek**

Pelaksanaan Kuliah kerja Praktek yang dilaksanakan selama satu bulan pada Kementrian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste. Pada pelaksanaan kuliah kerja praktek ini penulis di tempatkan pada bagian Direktorat Nasional Perencanaan, pembiayaan, pengadaan dan Logistik, bagian ini mempunyai fungsi

pertama yaitu untuk melakukan penganggaran pada setiap tahunnya untuk pelaksanaan pekerjaan di Kementerian Solidaritas Sosial tersebut.

### **3.2.1.1 Prosedur Realisasi Alokasi Anggaran**

Prosedur pelaksanaan anggaran pada Kementerian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste pada umumnya adalah:

1. Rencana anggaran masing-masing di susun oleh kementerian sesuai dengan yang dibutuhkan pada kementerian tersebut selama satu tahun.
2. Bagian Direktorat Nasional Perencanaan, Pembiayaan, Pengadaan dan Logistik. Mengadakan rapat dengan seluruh Departemen Kementerian Solidaritas Sosial untuk debat tentang anggaran uang yang di butuhkan masing-masing Departemen untuk satu tahun.
3. Anggaran yang telah di susun akan di bawah ke rapat *planning* Dewan Menteri untuk di bahas.
4. Setelah itu diajukan ke Parlemen untuk di diskusikan dengan deputi parlemen dan di pertahankan oleh Perdana Menteri bersama masing-masing Menteri apabila di sahkan oleh dewan parlemen maka akan dikirim ke presiden untuk disahkan.
5. Setelah di sahkan oleh presiden maka Perdana Menteri membagikan kepada masing-masing Kementerian untuk melaksanakannya.

Anggaran yang di Realisasikan pada Kementerian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste pada tahun 2014 dan 2015 adalah:

Tabel 3.2.1.1.1  
**ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 dan 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN 2014</b>	<b>REALISASI ANGGARAN 2014</b>	<b>KET</b>
1	PENGADAAN BARANG	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
2	PEMBANGUNAN	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,430,000.00</b>	<b>\$ 1,430,000.00</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN 2015</b>	<b>REALISASI ANGGARAN 2015</b>	<b>KET</b>
1	PENGADAAN BARANG	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
2	PEMBANGUNAN	\$ 1,500,000.00	\$ 1,125,000.00	75%
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,750,000.00</b>	<b>\$ 1,375,000.00</b>	

### 3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Di Lapangan

Hambatan yang terjadi pada tempat Kerja Praktek Kementerian Solidaritas Sosial ini adalah kurangnya fasilitas seperti Meja, Komputer, Kursi dll, maka pekerjaan sering berjalan lambat seperti koneksi internet yang sangat lambat sehingga banyak pekerjaan yang sering dipending.

Di Kementerian Solidaritas Sosial ini juga hanya memiliki beberapa kantor cabang di setiap Kabupaten sehingga jika terjadi permasalahan yang terjadi di kabupaten atau desa yang terpencil maka akan sulit untuk ditangani secara langsung dari kantor pusat. Penanganan permasalahan akan lebih lambat karena semua permasalahan harus di tanggani dari kantor pusat.

### **3.2.1.3 Upaya Yang Telah Dilakukan Instansi Untuk Mengatasi Hambatan**

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Solidaritas Sosial ini adalah melakukan penganggaran setiap tahun untuk pengadaan barang dan pembangunan dan melakukan pembelanjaan peralatan kantor seperti Meja, Kursi, alat tulis, Pembayaran Internet dan lain sebagainya. Dan penganggaran untuk melakukan pembangunan kantor cabang di setiap kabupaten untuk gedung atau kantor cabang di setiap kabupaten agar penanganan permasalahan yang terjadi di Kabupaten akan lebih cepat di tangani oleh kantor cabang di setiap Kabupaten tersebut.

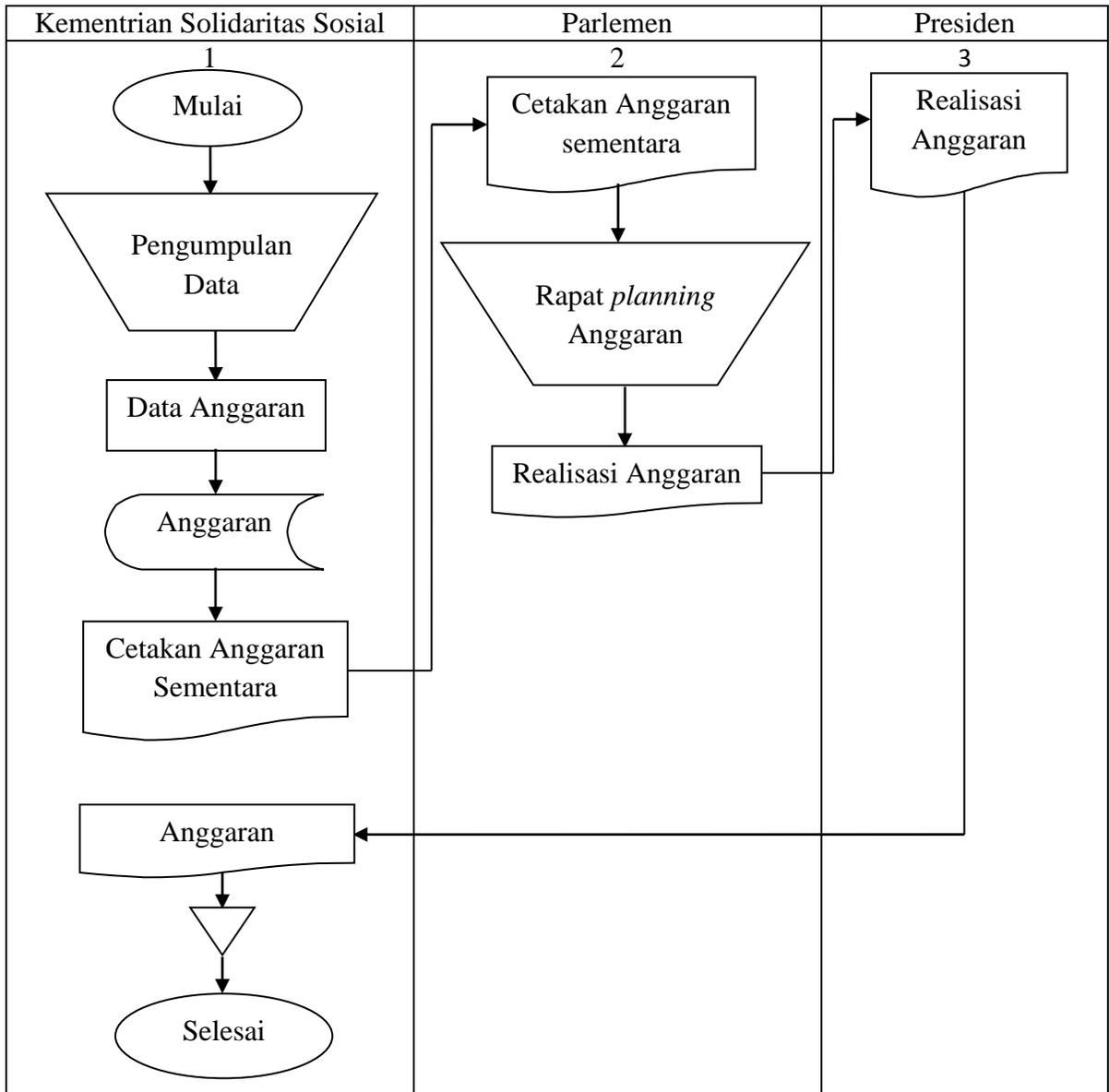
## **3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek**

### **3.2.2.1 Prosedur Realisasi Alokasi Anggaran**

Anggaran uang untuk setiap Kementerian di Timor Leste sudah dipaketkan jumlahnya oleh masing-masing Menteri pada setiap Kementerian dan sudah di sahkan oleh Presiden. Anggaran uang yang ada untuk satu tahun tidak boleh dirubah dan tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan yang dilakukan pada Kementerian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste ini di laksanakan sesuai dengan anggaran yang telah di tentukan untuk satu tahun. Sehingga semua pekerjaan dan uang yang akan digunakan disesuaikan dengan anggaran yang telah di realisasikan. Jika uang tersebut

melebihi atau berkurang maka pada penutupan buku pada akhir tahun sisa uang tersebut akan di anggaran kan lagi dan akan di tambahkan lagi dengan uang yang akan di anggarkan pada satu tahun yang akan datang. Dan jika uang pada aggarang sebelumnya tidak cukup maka pada perencanaan anggaran yang akan datang akan ditambahkan melebihi Anggaran uang dari paket uang yang sebelumnya.

*Flowchart* Untuk Prosedur Realisasi Alokasi Anggaran Pengadaan Barang Dan Pembangunan Pada Kementrian Solidaritas Sosial.



### 3.2.2.2 Hambatan Yang Terjadi Di Lapangan

Hambatan yang terjadi di instansi pemerintahan Kementerian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste ini mempunyai hambatan atau permasalahan yang terjadi karena suatu kementerian memiliki banyak

pekerjaan penting untuk negara dan tujuan untuk mengsejahterakan kehidupan masyarakat, oleh karena itu pekerjaannya pun tidak mudah. Di instansi ini memiliki permasalahan seperti kurangnya fasilitas seperti meja, kursi, alat tulis untuk kantor dan masih kurang kantor cabang di setiap kabupaten dan Desa-desa, tetapi para pekerja di instansi ini sangat bisa melakukan pekerjaannya dengan baik tetapi karena kurangnya fasilitas di instansi ini maka pekerjaan sering berjalan lambat seperti koneksi internet yang sangat lambat sehingga banyak pekerjaan yang sering dipending.

Kementrian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste ini juga hanya memiliki beberapa kantor cabang di setiap kabupaten sehingga jika terjadi permasalahan yang terjadi di kabupaten atau desa yang terpencil akan sulit untuk ditangani secara langsung dari kantor pusat. Penanganan permasalahan akan lebih lambat karena semua permasalahan harus di tangani dari kantor pusat.

### **3.2.2.3 Upaya Yang Telah Dilakukan Kementrian Solidaritas Untuk Mengatasi Hambatan**

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementrian Solidaritas Sosial Dili, Timor-Leste untuk mengatasi hambatan yang ada adalah melakukan penganggaran setiap tahun untuk pengadaan barang dan pembangunan, untuk melakukan pembelanjaan untuk kantor seperti Meja, Kursi, alat tulis,

Pembayaran Internet dan lain sebagainya dan melakukan pembangunan untuk gedung atau kantor cabang di setiap kabupaten.

Sehingga Penganggaran ini sangat bermanfaat bagi seluruh Kementrian termasuk Kementrian Solidaritas Sosial Dili, Timor Leste karena dari Anggaran tersebut maka Kementrian dapat melaksanakan pekerjaan yang ada dengan sebaik mungkin.